

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENERBITAN KARTU  
INDONESIA PINTAR (KIP) TERHADAP PENINGKATAN MINAT DAN  
PEMERATAAN PENDIDIKAN ANAK USIA SEKOLAH  
DILEMBAGA PEDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH DARUSSALAM  
BANDUNG KECAMATAN WONOSEGORO KABUPATEN BOYOLALI

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu Kependidikan Program Studi Pendidikan Geografi  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



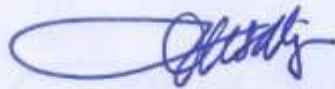
Oleh  
Ria Fuatun  
NIM 1612100001

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN  
TAHUN 2020

## HALAMAN PERSETUJUAN

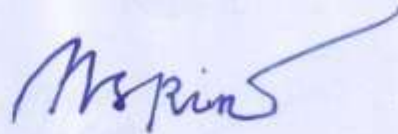
Skripsi yang berjudul “ IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENERBITAN KARTU INDONESIA PINTAR ( KIP ) TERHADAP PENINGKATAN MINAT DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN ANAK USIA SEKOLAH DI LEMBAGA PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH DARUSSALAM BANDUNG KECAMATAN WONOSEGORO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020 ” yang disusun oleh Ria Fuatun NIM 1612100001 ini telah disetujui oleh dewan pembimbing Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Widya Dharma Klaten :

Pembimbing I



Drs. H. JAJANG SUSATYA, M.Si  
NIP. 19611209 199103 1001

Pembimbing II



MELANIA SWETIKA RINI, S.Pd M.Sc  
NIK. 690 411 317

Ka. Program Pendidikan Geografi



Drs. H. JAJANG SUSATYA, M.Si  
NIP. 19611209 199103 1001

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan dewan penguji skripsi fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan universitas widya dharma klaten dan diterima untuk memenuhi sebagian syarat guna mendapatkan gelar sarjan Pendidikan.

Pada hari / tanggal : .....

Tempat : Universitas Widya Dharma Klaten

Susunan Panitia Dewan Penguji Skripsi

Ketua,



Dr. H. RONGGO WARSITO, M.Pd  
NIK. 690 890 113

Sekretaris,



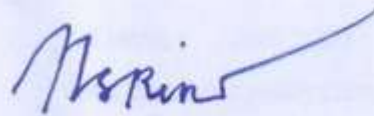
KHUNTUM RIA ANGGRAHENY M.Sc  
NIK. 690 118 382

Penguji I,



Drs. H. JAJANG SUSATYA, M.Si  
NIP. 19611209 199103 1001

Penguji II,



MELANIA SWETIKA RINI, S.Pd M.Sc  
NIK. 690 411 317

Mengetahui,

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dekan,



Dr. H. RONGGO WARSITO, M.Pd  
NIK. 690 890 113

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ria Fuatun  
NIM : 1612100001  
Program Studi : Pendidikan Geografi  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini berdasarkan kesadaran penuh, menyatakan bahwa naskah skripsi ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi. Sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia untuk bertanggungjawab terhadap isi dalam naskah skripsi ini secara akademik maupun yuridik serta bersedia menerima resiko apapun apabila terjadi pelanggaran terhadap pernyataan ini.

Klaten, Juni 2020

Yang membuat pernyataan



Ria Fuatun

NIM. 1612100001

## MOTTO

1. QS. Ath-Thalaq, ayat 2-3

ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ  
مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ  
قَدْرًا (3) {

“Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”

2. Albert Einstein

“Religion without science is blind. Science without religion is paralyzed”

(Agama tanpa ilmu adalah buta, Ilmu tanpa agama adalah lumpuh)

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur ke hadirat Illahi Robbi yang maha pemberi segalanya berupa kebaikan dan dari hati yang terdalam, skripsi ini penulis persembahkan:

1. Kepada kedua orang tua bapak Sofrowi dan ibu Rohmiyatin yang selalu senantiasa memberikan do'a yang tulus dan ikhlas, kasih sayang, semangat yang tiada henti, motivasi, arahan, bimbingan dan inspirasi kepada penulis dalam menuntut ilmu
2. Kepada bapak Drs. H. Jajang Susatya, M.Si yang selalu memberikan dukungan, arahan dan bimbingan serta selalu memotivai penulis dalam proses penyusunan naskah skripsi. hal ini menjadi penyemangat bagi saya untuk dapat menyelesaikan pendidikan ini. semoga beliau mendapatkan berkah yang melimpah dari Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan serta panjang umur. Aamiin
3. Almamaterku tercinta Universitas Widya Dharma Klaten semoga semakin jaya, berkualitas dan semakin di depan dengan nilai-nilai kebaikan.
4. Kepada Dosen, Sahabat seperjuangan yang selalu memberikan energi positif kepada penulis sehingga penulis mampu membuat skripsi dengan baik. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sudah semestinya kita panjatkan ke hadirat Illahi Robbi atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi ini yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penerbitan Kartu Indonesia Pintar ( KIP ) Terhadap Peningkatan Minat dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Sekolah Di Lembaga Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Darussalam Bandung Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2019 / 2020 ” dapat terselesaikan, yang mana mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tersusun bukan semata – mata hasil usaha sendiri, akan tetapi berkat bimbingan motivasi dan dukungan dari semua pihak baik secara moril dan juga materil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Triyono, M.Pd selaku Rektor Universitas Widya harma Klaten, Yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan.
2. Bapak Dr. H. Ronggo Warsito, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Widya Dharma Klaten.
3. Bapak Drs. H. Jajang Susatya, M.Si, selaku Ketua Program studi Pendidikan Geografi yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Melania Swetika Rini, S.Pd M.Sc selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah memberikan pengajaran serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.

6. Rekan sahabat seperjuangan, yang mampu bertahan, berproses menjadi pribadi yang lebih baik, sahabat yang selalu memberi pecutan semangat untuk penulis. Yang telah bersama selama kurang lebih 4 tahun ini, selalu bersama dalam proses belajar, berjuang bersama menghadapi proses perkuliahan
7. Semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam ukhuwah Islamiyah.

Akhirnya semoga amal baik tersebut mendapatkan imbalan pahala dari Allah SWT, dan penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang kependidikan.

Klaten, Juni 2020

Penulis,

Ria Fuatun  
NIM. 1612100001



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Batasan Masalah .....	11
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan .....	12
F. Manfaat .....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	14
A. Hakikat Kebijakan Pendidikan .....	14
B. Implementasi Kebijakan Pendidikan .....	19
1. Pengertian Implementasi .....	19
2. Sumber Daya .....	26
3. Disposisi .....	26
4. Struktur Birokrasi .....	27
C. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar .....	29
1. Pengertian .....	29
2. Dasar Hukum .....	31
3. Tujuan .....	33
4. Sasaran .....	34

5. Kuota dan Alokasi Anggaran kartu Indonesia Pintar .....	35
6. Sumber Pembiayaan .....	38
7. Pemanfaatan Dana .....	38
8. Mekanisme Penetaan dan Penyaluran Kartu Indonesia Pintar....	38
D. Pertanyaan Peneliti .....	43
BAB III METODE PENELITIAN .....	44
A. Pendekatan Penelitian .....	44
B. Jenis Penelitian .....	45
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	45
D. Tempat dan Waktu Penelitian .....	46
E. Teknik Pengumpulan Data .....	46
F. Instrument Penelitian .....	48
G. Teknik Analisis Data .....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	54
A. Profil MTs Darussalam Bandung Wonosegoro .....	54
1. Identitas Sekolah .....	54
2. Visi dan Misi .....	55
3. Keadaan sekolah .....	55
4. Sumber Daya Guru yang dimiliki .....	56
B. Hasil Penelitian .....	59
1. Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di MTs Darussalam Bandung Wonosegoro.....	59
2. Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam Upaya Pemerataan Pendidikan tahun pelajaran 2019 / 2020 ....	62
3. Pembuatan Surat Keputusan ( SK ) Kepala Madrasah.....	68
C. Pembahasan .....	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	78
LAMPIRAN .....	81

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Besaran Dana .....	35
Table 2.2	: Mekanisme Pengambilan Dana .....	41
Tabel 3.1	: Kisi – Kisi Instrumen Observai .....	48
Table 3.2	: Kisi – Kisi Instrument Wawancara .....	49
Table 3.3	: Kisi – Kisi Dokumentasi .....	50
Table 4.1	: Status Guru .....	57
Tabel 4.2	: Jumlah Siswa .....	57
Tabel 4.3	: Sarana Dan Prasaranaa Sekolah .....	58
Table 4.4	: Sarana Dan Prasarana Lainnya.....	59

## ABSTRAK

RIA FUATUN, NIM: 1612100001, Program Studi Pendidikan Geografi, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten, Skripsi: Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Terhadap Peningkatan Minat dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Sekolah Di Lembaga Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Darussalam Bandung Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2019 / 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan KIP dalam upaya peningkatan minat terhadap Pendidikan anak usia sekolah serta pengentasan masalah buta huruf, mengingat kondisi geografis wilayah kecamatan wonosegoro merupakan wilayah yang masih paguyuban atau pedesaan, hingga fungsinya ialah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran KIP di MTs Darussalam Wonosegoro adalah siswa yang memiliki kartu KIP sebanyak 70 siswa. KIP adalah bantuan berupa uang tunai diberikan kepada siswa yang orang tuanya tidak atau kurang mampu membiayai pendidikan anaknya. Hasil dari pelaksanaan KIP dapat mendukung upaya peningkatan minat. Faktor pendukung implementasi KIP: informasi dari pihak dinas secara rutin ke sekolah dan secara *online*, Emis digunakan pemerintah sebagai salah satu indikator penentuan sasaran penerima KIP, adanya rasa saling percaya antara pihak sekolah dengan siswa beserta orang tua terhadap penggunaan dana KIP, siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi.

Faktor penghambat: evaluasi program KIP yang dilaksanakan setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan pada mekanismenya, penyelewengan dana KIP, kesulitan mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana KIP.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kartu Indonesia Pintar, peningkatan minat Pendidikan

## ABSTRACT

RIA FUATUN, NIM: 1612100001, Geography Education Study Program, Department of Social Sciences, Faculty of Teacher Training and Education, Widya Dharma Klaten University, Thesis: Implementation of Government Policy Concerning the Issuance of Smart Indonesia Cards (KIP) towards Increasing Interest and Equitable School-Age Education At the Madrasah Tsanawiyah Darussalam Bandung Educational Institute, Wonosegoro District, Boyolali Regency, 2019/2020 Academic Year.

This study aims to describe the implementation of KIP policies in increasing interest in school-age education and alleviating illiteracy, considering the geographical conditions of the Wonosegoro sub-district are areas that are still community or rural, so that their function aims to improve community welfare. This research use descriptive qualitative approach.

The results showed that the KIP targets at MTs Darussalam Wonosegoro were 70 students who had KIP cards. KIP is assistance in the form of cash given to students whose parents cannot afford their children's education. The results of implementing KIP can support increased interest efforts. Supporting factors for the implementation of KIP: information from the office on a regular basis to schools and online, the government is used by the government as an indicator of targeting KIP recipients, there is mutual trust between the school and students and parents regarding the use of KIP funds, students become more active because school equipment can be fulfilled.

Inhibiting factors: the KIP evaluation program implemented every program period that causes changes to the mechanism, misappropriation of KIP funds, difficulty collecting receipts or proof of use of KIP funds.

Keywords: Policy Implementation, Smart Indonesia Card, increasing interest in education

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan aspek penting yang dianggap sangat menentukan tingkat kemampuan seseorang dalam menghadapi kehidupan. Melalui pendidikan yang mencukupi, kita dapat hidup dengan layak seperti yang diharapkan. Tentunya harapan manusia dimasa yang akan datang adalah hal yang baik, yaitu keadaan dimana kehidupan kita lebih baik dari keadaan sekarang. Penyelenggaraan Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pencerahan dan sekaligus perubahan pola hidup kepada peserta didik.

Mohammad Saroni (2013: 9) menyatakan bahwa pencerahan diperlukan sebagai satu usaha sadar untuk menjadikan kita sebagai sosok penting dalam kehidupan dan perubahan yang dimaksud adalah untuk mempersiapkan kita sebagai sosok yang mampu menghadapi setiap perubahan dalam kehidupan.

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu yang dijadikan prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan, seperti: ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Hal ini mengakibatkan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu pemerintah wajib bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan

kesejahteraan umum. Selanjutnya dalam PP 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom khususnya pasal 3 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah khususnya pasal 3 a bahwa penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu menjadi tanggung jawab daerah.

Pemerintah daerah memahami situasi wilayahnya untuk menentukan kebijakan pendidikan terutama pemerataan pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP 25 Tahun 2005, maka semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali, baik “orang kaya”maupun”orang miskin” dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan (terpencil).

Menurut Undang – Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Berdasarkan UU Sisdiknas tersebut diharapkan pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan,bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian,



pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor penentu suatu bangsa untuk bisa memenangkan kompetisi global.

Pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah, dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun. Upaya-upaya ini lebih mengacu pada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan dilakukan dengan mengupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa mengenal usia, waktu, tempat mereka tinggal yakni baik di kota maupun desa tetap sama. Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, namun belum semua warga negara Indonesia mampu mengakses pendidikan sehingga tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai.

Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Kemiskinan dan pendidikan adalah dua aspek yang memiliki kaitan sangat erat apabila digabungkan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Kemiskinan menyebabkan terbatasnya masyarakat untuk mengakses pendidikan, sedangkan pendidikan bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka hadapi.

Kemiskinan inilah yang menjadi salah satu penyebab pemerataan pendidikan kurang terlaksana dan sebagai salah satu isu masalah pendidikan di Indonesia. Arif Rohman (2009:245) menyebutkan bahwa masalah pemerataan pendidikan muncul karena dalam UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa semua

warga negara berhak mendapatkan pengajaran/pendidikan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan wajib diselenggarakan oleh pemerintah secara merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Kesempatan warga miskin untuk mendapatkan pendidikan pun nampaknya masih belum merata.

Hadi Supeno (1999: 11) menyatakan bahwa pendidikan yang dulunya begitu mulia, yakni melepaskan rakyat dari cengkeraman kemelaratan, kini telah menjadi alat dari sistem masyarakat kapitalis. Pendidikan hanyalah milik mereka yang berduit, dan mereka yang berasal dari kelas menengah dan atas. Pendidikan telah menjadi barang mewah, dengan harga yang begitu mahal. Pasal 34 UUD 1945 telah menjamin bahwa fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh Negara. Kalimat tersebut jika kita kaji pada tataran empiris sehari- hari hanyalah sebuah cita – cita yang tidak tahu sampai kapan akan merata sampai pada lapisan masyarakat paling bawah khususnya masyarakat miskin.

Muhammad Saroni (2013: 7) menyebutkan bahwa para elite politik di tingkat pusat maupun daerah masih bergelut pada kepentingan masing – masing sehingga kepentingan kaum miskin yang menjadi amanat tugas mereka malah terabaikan. Akibatnya, kaum miskin terpaksa berjuang sendiri berhadapan dengan dinamika kehidupan yang memperlihatkan muka tak ramah di hadapan mereka. Masalah pembiayaan pendidikan selalu menjadi masalah krusial bagi masyarakat, terutama pada lapisan masyarakat menengah ke bawah.

Menurut Muhammad Saroni (2013: 27) menyatakan bahwa mereka adalah masyarakat yang sering menjadi korban dari biaya pendidikan yang terus melangit. Masyarakat kelompok lapisan ini sering harus rela menjadi penonton di

pinggir lapangan pendidikan sebab tidak mampu membeli karcis untuk kursi penonton yang nyaman. Mereka tidak mampu mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya. Hal ini tentu saja menjadikan mereka sebagai kelompok masyarakat yang dikecewakan oleh kondisi.

Boyolali menempati urutan ketiga daerah berpenduduk miskin di Soloraya berdasarkan data BPS 2019. Jumlah warga miskin di Boyolali mencapai 93.750 jiwa atau 9,53 persen dari total penduduk 983.557 jiwa. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Boyolali, Sugita, mengatakan salah satu indikator warga miskin, yakni pengeluaran per kapita per bulan tidak lebih dari Rp332.996. "Kita tidak bisa mendata pemasukan seseorang. Sebab, banyak penduduk yang selalu memanipulasi pendapatan mereka. BPS melihat indikator warga miskin berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan," Data angka kemiskinan sepanjang 2019 itu turun dibandingkan 2018 yang mencapai 98.200 jiwa atau 10,04 persen dari 978.515. Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,53 persen menurun 0,51 persen dari 2018.

"Secara umum, pada periode tahun 2012-2019 tingkat kemiskinan di Kabupaten Boyolali mengalami penurunan dari tahun ke tahun baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kami tak memerinci persebaran angka miskin di masing-masing kecamatan," Jika mengacu angka kemiskinan berdasarkan persentase, maka Boyolali termasuk tertinggi ketiga di Soloraya. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Angka kemiskinan bisa dilihat dari dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan dimensi lainnya. "Ada dimensi

lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan,” imbuh Sugita.

Pada Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan di bandingkan Maret 2018. Jumlahnya penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan sekitar 1,02. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan turun menjadi 0,30. Wakil Bupati Boyolali, M. Said Hidayat, saat rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Boyolali, pada 19 Desember 2019, mengatakan mengatasi kemiskinan itu tidak mudah. Semakin kecil angkanya semakin tidak mudah untuk menurunkannya. Menurut Said Hidayat, yang lebih tahu kemiskinan itu warga di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga RW dan RT. Lembaga RT lebih tahu persis siapa yang miskin di lingkungannya. Lembaga itu sudah terstruktur ke atas hingga ke kabupaten. “Maka TKPKD menekan angka kemiskinan dengan pendekatan struktural,” ujarnya.

Said Hidayat menyampaikan kemiskinan itu tidak kelihatan karena bisa dilihat dari dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan dimensi lainnya. Pihaknya berharap adanya sinergitas program penanganan kemiskinan agar lebih optimal. Salah satu langkah yang dilakukan yakni Pemutakhiran Data Basis Terpadu (PBDT) yang menjadi acuan penanggulangan kemiskinan serta meminta semua pihak untuk mengecek dan menganalisa data kemiskinan di Boyolali.

(Badan Pusat Statistik 2016). Beberapa kasus memang terkait dengan faktor ekonomi, seperti banyaknya anak-anak yang terpaksa bekerja untuk mencari nafkah pada usia sekolah. Namun banyak faktor lain yang menjadi penjelas putus sekolah, seperti ketersediaan akses dan fasilitas pendidikan yang memadai dan terjangkau. Saat ini, kita juga dihadapkan pada fenomena meningkatnya putus sekolah pada anak karena kejadian kehamilan yang tidak dikehendaki pada anak-anak. Kajian yang lebih komprehensif perlu dilakukan untuk menjawab akar persoalan dari angka putus sekolah ini. Tetap dibutuhkan upaya pemerintah untuk menurunkan angka putus sekolah ini dalam rangka mencapai pemerataan pendidikan khususnya di Daerah Kabupaten Boyolali.

Upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yaitu salah satunya melalui program Kartu Indonesia Pintar. Program tersebut diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya. Kartu Indonesia Pintar sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin, karena siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah. Hal ini disebabkan karena keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang mendukung, sehingga siswa tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih bekerja.

Kebijakan Kartu Indonesia Pintar diluncurkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Tujuan dari program tersebut adalah 1) membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, 2)mencegah anak putus sekolah, 3) untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku.

Adanya Kartu Indonesia Pintar diharapkan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah dengan alasan kurangnya biaya. Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar hingga sekolah Menengah Atas. Sumber dana bantuan ini adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). Dana bantuan ini merupakan bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).

Program Indonesia Pintar ini merupakan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang telah bergulir sejak tahun 2008. Kartu Indonesia Pintar juga menjamin anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu baik yang bersekolah maupun tidak. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015). Fenomena yang terjadi salahsatunya adalah masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana KIP serta masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima

dana KIP. Padahal seharusnya pemerintah meluncurkan program ini adalah diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin agar mendapat kesempatan pendidikan yang sama.

Fungsi dari dana KIP adalah pembelian buku dan alat tulis sekolah, pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll), biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa/ iuran bulanan siswa, biaya kursus/les tambahan, keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah/madrasah. Masalah lain yang terjadi adalah sulitnya pengawasan yang dilakukan, hal ini dikarenakan mekanisme penyaluran dana yang langsung ditransfer ke rekening siswa. Dana tersebut yang mengelola adalah orang tua siswa dan pihak sekolah hanya sebagai implementor sulit mengawasi penggunaan dana tersebut. Pada saat penerimaan dana KIP orang tua siswa tidak dapat mengelolanya dengan baik sehingga, dana KIP menjadi tidak tepat sasaran karena digunakan untuk keperluan pribadi bukan sebagai keperluan pendidikan.

Salah satu sekolah di Kabupaten Boyolali yang memiliki siswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar adalah MTs Darussalam Bandung. MTs Darussalam Bandung terletak di Desa Bandung Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun pelajaran 2019/2020 terdapat 70 siswa miskin dari sekolah ini yang menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Masing- masing siswa di sekolah ini menerima bantuan sebesar Rp. 750.000,00 per tahun, dan ada pula Rp. 375.000,00 per semester. Dana tersebut digunakan oleh siswa untuk membeli perlengkapan kebutuhan sekolah, diantaranya untuk membeli alat tulis, tas, sepatu, dan lain- lain.



Siswa tersebut mendapat bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikirim dari Pemerintah pusat. Adanya kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang berasal dari pusat ini mendorong sekolah untuk mengimplementasikannya secara operasional. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan karena dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih rinci mengenai implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan di MTs Darussalam Bandung.

#### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki prosentase kemiskinan rendah yakni 23,03% atau 157,09 ribu pada tahun 2011 dan menurun menjadi 20,83% atau 148,39 ribu orang pada periode 2014. Penurunan selama tiga tahun tersebut (2,2%) masih rendah karena belum mencapai target seperti yang diharapkan.
2. Mayoritas masyarakat adalah dari kalangan keluarga yang tidak dan atau kurang mampu.
3. Kurang selektif dalam pemberian Kartu Indonesia Pintar, sehingga masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana KIP serta masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana KIP.

4. Banyaknya penyalahgunaan dana KIP karena lemahnya pengawasan dari pihak Dinas maupun Sekolah.

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang luas. Oleh karena itu, pembatasan masalah diperlukan agar masalah dapat diteliti secara jelas, fokus dan terarah. Penelitian ini dibatasi pada implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam upaya peningkatan minat Pendidikan anak usia sekolah tahun pelajaran 2019/ 2020 di MTs Darussalam Bandung Wonosegoro.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar di MTs Darussalam Bandung tahun pelajaran 2019/ 2020?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan tahun pelajaran 2019/ 2020 di MTs Darussalam Bandung Kabupaten Gunungkidul?
3. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun pelajaran 2019/ 200 di MTs Darussalam Bandung?

### E. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar di MTs Darussalam Bandung tahun pelajaran 2019/ 2020
2. Mendeskripsikan implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan tahun pelajaran 2019/ 2020 di MTs Darussalam Bandung.
3. Mendeskripsikan faktor- faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun pelajaran 2019/ 2020 di MTs Darussalam Bandung.

### F. Manfaat

1. Manfaat teoretis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan serta menambah kepustakaan dalam dunia pendidikan mengenai implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar.
2. . Manfaat praktis
  - a. Bagi Dinas Pendidikan  
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan dalam mengambil keputusan terkait dengan Kebijakan Kartu Indonesia Pintar.
  - b. Bagi Pemerintah Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan layanan pelaksanaan tugas kepada kalangan yang membutuhkan.

- c. Bagi Peneliti Dapat menambah wawasan mengenai Kebijakan Kartu Indonesia Pintar serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti kebijakan dan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi perencanaan kebijakan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa:

- 1) Siswa penerima bantuan KIP di MTs Darussalam Bandung berjumlah 70 siswa yang seluruhnya memiliki KIP. Siswa yang menerima bantuan KIP telah memenuhi satu kriteria dari berbagai kriteria yang telah ditentukan.
- 2) Kepemilikan KIP mendukung pemerataan pendidikan, hal ini ditandai dengan keadaan dan kondisi keluarga siswa yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial serta penetapannya dengan mencocokkan antara Emis Online dengan data dinas kementerian sosial.
- 3) Mekanisme pelaksanaannya ialah sekolah mengirimkan data secara online dengan menginput berkas KIP dan pendukungnya di Emis online. Perlu diketahui bahwa sekolah juga dapat mengusulkan nama siswa lain yang di luar kepemilikan KIP untuk turut serta diusulkan sebagai calon penerima KIP dengan sesuai kriteria sasaran yang ditetapkan serta memiliki surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa.
- 4) Faktor pendukung implementasi KIP: informasi dari pihak Kankemenag kabupaten Boyolali ke sekolah dan secara online, Emis digunakan pemerintah sebagai salah satu manajemen informasi data lengkap siswa untuk menentukan sasaran penerima KIP, adanya rasa saling percaya antara pihak sekolah dengan

siswa beserta orang tua terhadap penggunaan dana KIP, siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi. Faktor penghambat: evaluasi program KIP yang dilaksanakan pada setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan khususnya pada mekanismenya, Penyelewengan dana KIP, kesulitan mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana KIP.

## B. Saran

Berdasarkan pada penelitian dan beragam informasi yang telah diperoleh, maka dari hasil kajian penelitian mengenai implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP), peneliti memiliki beberapa saran, yaitu:

- 1) Bagi pemerintah, diharapkan mekanisme yang berubah disetiap periodenya diikuti dengan sosialisasi yang jelas agar semua pihak dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, pemerintah seharusnya membentuk tim monitoring Kartu Indonesia Pintar (KIP), karena menurut hasil dari wawancara peneliti menjelaskan bahwa dari pihak sekolah maupun dinas tidak ada monitoring. Kemudian pemerintah hendaknya lebih memberikan kewenangan yang luas kepada pihak sekolah agar turut berperan aktif dalam mengambil keputusan kebijakan Kartu Indonesia Pintar.
- 2) Bagi sekolah
  - a. Mengenai isu peningkatan mutu, diharapkan sekolah dapat melakukan pembinaan bagi siswa penerima KIP dengan intensif agar siswa penerima KIP juga mampu bersaing, sehingga secara tidak langsung kondisi tersebut membantu meningkatkan mutu pendidikan siswa tersebut.

- b. Sekolah juga diharapkan dalam memberikan dana KIP tidak hanya siswa saja yang menerima, namun juga turut mengundang orang tua siswa agar dapat menyaksikan bahwa anak mereka mendapatkan dana KIP. Meskipun sekolah sudah percaya dengan siswa, namun alangkah lebih baik apabila orang tua juga turut diundang.
- c. Sekolah diharapkan dapat mengelola data, arsip atau dokumen sekolah dan selalu menyiapkan backup data. Sehingga apabila suatu saat ditanyakan oleh peneliti atau pihak pelaksana kebijakan, sekolah dapat mempertanggungjawabkan tugas mereka



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Idi. (2013). *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Abi Surya Prima Satya. (2013). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Kewirausahaan di Sanggar Kegiatan Belajar Bantul Kabupaten Bantul DIY*. SKRIPSI.
- Arif Rohman. (2014). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- \_\_\_\_\_. (2001). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan UNY.
- <https://boyolalikab.bps.go.id/site/pilihdata.html> Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Kabupaten Boyolali
- Burhan Bungin. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dwi Siswoyo, dkk. (2011). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Ghafuur Kharisma Ramadhan. (2014). *Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar di Kecamatan Sambas*. Jurnal. Universitas Tanjungpura.
- Hadi Supeno (1999). *Pendidikan dalam Belenggu Kekuasaan*. Magelang: Pustaka Paramedia.

- H.A.R Tilaar & Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Joko Widodo. (2006). *Analisis kebijakan publik konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lexy J. Moleong. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles. B. mattew & Michael Hubberman. (1992). *Anslisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Muhammad Rifai (2011). *Politik Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Ar-Ruzz
- Muhammad Saroni. (2013). *Pendidikan untuk Orang Miskin Membuka Keadilan dalam Kesempatan Berpendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nanang Fattah. (2012). *Sistem penjaminan mutu pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugraheni Sukarno. (2013). *Implementasi Kebijakan Sekolah Dalam Perubahan Kurikulum (Kurikulum Periode 1994, 2004, 2006 & 2013) Di SMA N 2 Wates Kulon Progo Yogyakarta*. SKRIPSI. UNY.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015.*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015.*
- Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.

\_\_\_\_\_. (2008). *Kebijakan Pendidikan yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rulam Ahmadi. (2014). *Pengantar Pendidikan Asas & Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.